

# Empat Tuntutan Kiara pada KKP

**Bonita Ningsih JAKARTA (HN)** -Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi "Lindungi Nelayan dan Perempuan Nelayan Indonesia" di depan pintu gerbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertepatan dengan Hari Ikan Sedunia 21 November. Dalam aksi tersebut, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA, Selamat Daroyni menyatakan empat tuntutan dari para nelayan untuk pemerintah Indonesia. Tuntutan pertamanya terkait dengan pengakuan dan perlindungan terhadap nelayan dan petambak tradisional baik laki-laki dan perempuan. "Selama ini kondisi nelayan tradisional kita tidak diakui, tidak dilindungi, dan tidak didukung modal dan teknologinya. Seharusnya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi nelayan dan petambak. Karena ini kaitannya dengan memenuhi hak-hak asasi kami yang sudah diatur undang-undang," cerita Selamat. Sesuai data dari KIARA tahun 2014, jumlah nelayan yang hilang atau meninggal dunia di laut sudah mencapai 255 jiwa. "Di lihat dari jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya perlindungan dari negara untuk nelayan dan petambak di Indonesia," keluhnya. Selamat melanjutkan, nelayan Indonesia juga menjadi korban pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini terlihat dari proyek PLTU Batang serta Giant Sea Walk di Teluk Jakarta. Setidaknya ada 10.961 nelayan tradisional Batang terancam kehilangan penghasilannya dan 16.855 nelayan tergusur karena proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). "Pemerintah juga tidak ada upaya untuk menghentikan eksploitasi terhadap pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya lagi. Masalah selanjutnya ialah penolakan terhadap dihapuskannya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan tradisional dan petambak. "Kami sangat terpukul jika BBM bersubsidi dihapuskan namun tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengantisipasinya. Ditambah lagi selama ini tidak ada transparansi dan keterbukaan dari pemerintah mengenai distribusi BBM bersubsidi selama ini, karena sebelumnya pun kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut," ceritanya. Yang terakhir ialah terkait dengan pencurian ikan yang selama ini terjadi di perairan Indonesia. Selamat mewakili seluruh para nelayan meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pengawasan pencurian ikan tersebut, dan memberikan sanksi kepada para pelaku pencurian tersebut. **Sumber:** <http://harnas.co/2014/11/21/empat-tuntutan-kiara-pada-kkp>